

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah elemen krusial dalam penelitian yang kita lakukan. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai penjelasan atau pemaparan mengenai literatur yang berkaitan dengan bidang atau topik tertentu. Tinjauan pustaka memberikan gambaran mengenai hal-hal yang sudah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya, serta teori atau hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diangkat, termasuk metode dan metodologi yang relevan. Wekke (2019a)

2.1.1 *Literature Review*

Penelitian terdahulu merupakan bahan pembanding yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dalam menyajikan berbagai sumber sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memperkuat baik teori yang digunakan dan teknik metode maupun jenis penelitian sebagai bahan literatur dan referensi pada teori dan Pelaksanaan *Open Government* sebagai berikut:

1. *Smart Government* Dalam Rangka Mewujudkan *Smart City* di Kota Bandung.

Artikel ini mengulas hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan smart government dalam mendukung terwujudnya *smart city* di Kota Bandung, khususnya pada penerapan *smart government*. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan konsep *smart government* menurut Cohen (2014), yang mencakup 3 dimensi yaitu *online services*, *infrastructure*, serta *Open Government*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *Smart government* dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Bandung yang dilihat dari 3 dimensi tersebut, secara umum menunjukkan karakteristik yang mendukung terwujudnya *smart city* di Kota Bandung. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat 1 (satu) dimensi yang karakteristiknya kurang mendukung, yaitu aspek *infrastructure*. Pada dimensi infrastruktur ini terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data *center*. Juga belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan *smart government*. Oleh karena disarankan agar Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun peta rencana kebutuhan dan pengembangan infrastruktur pada penerapan *smart government* dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Bandung.

2. Implementasi *Open Government Data* oleh Pemerintah Kota Bandung.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi *Open Government Data* oleh Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi *Open Government Data* dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan empat dimensi pelaksanaan *Open Government Data* yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti partisipasi dalam pembuatan dataset yang masih minim, kesadaran masyarakat tentang pentingnya *Open Data*, kapasitas seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung untuk

memanfaatkan teknologi pembuatan data, serta kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan *Open Data* Kota Bandung. Peneliti menyarankan bahwa agar pelaksanaan *Open Government Data* dapat berjalan lebih baik maka perlu dibentuknya perjanjian kerjasama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan juga dibangunnya fasilitas khusus bagi *Open Data* Kota Bandung sehingga berjalannya *Open Government data* di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif.

3. Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program *Open Data*: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik.

Open Data (OD) merupakan data terbuka bagi publik untuk digunakan, digunakan kembali, dan didistribusikan sesuai dengan kepentingannya. Pemerintah Kota Bandung merupakan Pemerintah Daerah Kota Pertama di Indonesia yang menerapkan program OD sebagai salah satu bentuk layanan publik di era digital. Walaupun praktek *E-government* sudah diterapkan pada layanan-layanan publik yang disediakan oleh berbagai instansi pemerintah Pusat maupun Daerah di Indonesia, secara umum masih terdapat kendala terkait sejauhmana data tersebut dapat diakses, digunakan, dan digunakan kembali oleh publik untuk berbagai kepentingan. Kajian yang dilakukan di Pemerintah Kota Bandung diarahkan pada upaya untuk menemukan model manajemen inovasi OD yang efektif di sektor publik dengan menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Berdasarkan temuan apangan, program OD yang dilaksanakan di Pemkot Bandung, merupakan kolaborasi *multiple actors* dan *stakeholders* (masyarakat, swasta, LSM) mulai dari tahap inisiasi sampai dengan

implementasinya. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan berbagai pihak yang terlibat tersebut membangun sebuah ekosistem *Open Data* yang bertujuan untuk memproduksi data yang kredibel bagi pengambilan keputusan, dan menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, program ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena belum secara optimal terintegrasi dalam Layanan Informasi Publik (LIP). Hal ini berimplikasi pada mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tidak tegas dan tidak lancar antar bidang dan antar-Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan OD dan LIP. Ketidaktegasan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan atas pemilihan dan tampilan data (diseminasi informasi) yang dipublikasikan.

Tabel 2. 1 *Literature Review*

Nama (Name)	Eko Budi Santso dan Annisa Rahmanita	Fhikri Fhutura Yudan dan Muhammad Arief Virgy.	Anne Friday Safaria, Ida Widianingsih, Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Jenis Luaran Laporan Penelitian	Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja	Jurnal Transformative	Jurnal Administrasi Publik: <i>Public Administration Journal</i>
Tahun	(2020)	(2021)	(2021)
Universitas (University)	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Universitas Padjajaran	Universitas Padjajaran, STIA Sebelas April Sumedang,
Judul (Title)	<i>Smart Government</i> Dalam Rangka Mewujudkan <i>Smart City</i> di Kota Bandung	Implementasi <i>Open Government Data</i> oleh Pemerintah Kota Bandung	Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program <i>Open Data</i> : Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik
Latar Belakang (Historical Background)	Seiring dengan kompleksnya permasalahan dalam kehidupan perkotaan, serta adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin mempermudah, mempercepat, dan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau electronic government dalam pemerintahan membuat <i>Open Government</i> semakin berkembang. <i>Open Data/Open Government</i> data atau jika diterjemahkan yaitu keterbukaan	Program OD merupakan inovasi yang diperkenalkan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari gerakan <i>Open Government</i> Indonesia (OGI), dengan pilot project ditiga pemda yaitu Pemerintah Provinsi DKI,

	meningkatkan akurasi Solusi atas berbagai permasalahan. Begitu juga kota-kota di Indonesia mulai banyak yang kemudian berusaha mengembangkan kotanya dengan konsep <i>Smart City</i>. Bahkan di Indonesia sejak tahun 2017 dicanangkan Gerakan 100 <i>Smart City</i> di Indonesia, yang dimotori oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika. Salah satu kota besar yang juga menerapkan <i>Smart City</i> adalah Kota Bandung. Kota Bandung ini relatif unik dalam penerapan <i>Smart City</i> karena pengembangan <i>e-government</i> di Kota Bandung sebelumnya relatif sangat massive lebih pesat dibanding kota-kota lain di Indonesia. Namun nyatanya dalam penerapan <i>Smart City</i> di Kota Bandung, khususnya pada penerapan <i>smart government</i>, masih menunjukkan performa yang kurang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian yang dapat mendeskripsikan maupun mengeksplorasi bagaimana penerapan <i>smart government</i> di Kota Bandung, khususnya pada penerapan <i>smart government</i> sebagaimana menurut Cohen.	data/keterbukaan data pemerintah dikembangkan dari konsep <i>Open Government</i>. <i>Open Government</i> data merupakan sebuah doktrin pemerintahan yang terbuka mengenai data-data yang dimilikinya untuk hal-hal tertentu sehingga publik dapat dengan bebas menggunakan data tersebut. Keterbukaan mengenai data ini selain memang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tetapi juga harapannya dapat digunakan oleh akademisi, pebisnis, birokrat, profesional dan kalangan lainnya untuk selain mengembangkan keahlian dibidang masing-masing juga untuk diskusi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada bulan Desember 2015 Pemerintah Kota Bandung meluncurkan portal <i>Open Data</i> yang dapat diakses di http://databandung.go.id. <i>Website</i> ini berupa portal <i>Open Data</i> yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Dalam perjalanan pelaksanaan <i>Open Data</i> Kota Bandung yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun masih terdapat permasalahan.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Kota Bandung (OGI, 2015). OGI sebagai Gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, dengan merujuk pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi. Menurut UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sekarang bernama KSP/Kantor Staf Presiden) (UKP4 et al, 2014) masih terdapat kondisi yang menghambat pelaksanaan OD di Indonesia. Berdasarkan permasalahan belum efektifnya pelaksanaan OD dikarenakan belum terintegrasi dalam Layanan Informasi Publik (LIP) secara optimal, maka artikel ini akan membahas dua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu: 1) bagaimana sebaiknya model OD yang terintegrasi dengan layanan informasi publik, dan 2) apasebetulnya manfaat OD bagi publik dan tata kelola pemerintah.
Konteks Kekinian terkait dengan topik (Current Content)	<i>Smart City dan Smart Government</i>	<i>Open Government dan Open Data</i>	<i>Open Data</i>
Teori-Teori Yang Telah Dan Sedang	Pelaksanaan <i>Smart Government</i> menurut Cohen (2014), yang mencakup 3 dimensi,	teori implementasi <i>Open Government</i> data yang berasal dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan	Menurut Zuiderwijk et al (Stagars, 2016) secara umum inisiatif Open Datamengikuti proses dasar

Dipergunakan Peneliti Lain	yaitu: <i>online services; Infrastructure, dan Open Government</i> .	Peter Lowit dari The Robert Gordon University, Skotlandia yang melaksanakan penelitian tentang implementasi <i>Open Government</i> data dengan penelitiannya yang berjudul "A Grounded Theory of <i>Open Government</i> Data: A Case Study in the UK". Dimensi dari teori tersebut yaitu <i>data sharing, standardization, awareness, dan government responsibility</i> .	yang terdiri atas lima tahap: <i>Creating data, opening data, finding data, using data, and discussing data</i>
Mendudukan Terminologi-Terminologi Yang Relevan Yang Dipergunakan Dalam Berbagai Peneliti Sejenis (Terminology) Metode Penelitian	Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif.	Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus.
Penjelasan Bukti- Bukti Terkait Penting Topik Riset Ini Hasil Penelitian	<i>Online services</i> , Terdapat 236 layanan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat kota baik melalui handphone maupun <i>website</i> ; Masih terdapat beberapa kendala dari sisi aplikasi diantaranya beberapa aplikasi mubazir karena tidak dilakukan <i>pengupdatean</i> data dan terdapat aplikasi yang <i>double</i> fungsinya. Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Bandung Smart Card yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung dalam melakukan transaksi elektronik (non tunai). <i>Infrastructure</i> , Terdapat 104 WiFi Bandung Juara yang disebar di ruang publik dan 1 (satu) sensor cuaca yang diharapkan dapat dioperasikan tahun	<i>Data Sharing</i> , Dalam hal pelaksanaan berbagi data, <i>Open Data</i> Kota Bandung bertindak sebagai tempat di mana data dibagikan dari produsen data. Selanjutnya Produsen data akan memproduksi data sesuai dengan ketentuan tertentu lalu diberikan kepada Bidang Data dan Statistik untuk kemudian ditampilkan di <i>website Open Data</i> Kota Bandung dengan ketentuan tertentu sesuai dengan standarisasi. <i>Standardization</i> , Dalam hal pelaksanaan standarisasi, <i>Open Data</i> Kota Bandung mengacu pada standar bintang tiga yang dipublikasikan oleh Tim Berners Lee yaitu format terbuka dan mudah untuk di produksi ulang. Tim Berners Lee menyatakan bahwa ada 5 standar bintang dalam <i>Open</i>	Model yang sesuai bagi inovasi <i>Open Data</i> adalah model yang melibatkan ekosistem Open Data dan menempatkannya dalam kerangka Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berikut ini gambar yang menampilkan rancangan model inovasi kolaboratif OpenData yang dapat diterapkan di setiap fase OD, yaitu: periode inisiasi, periode pengembangan dan periode pelaksanaan. rancangan model implementasi OD dalam kerangka inovasi kolaboratif menimbang pelaksanaannya secara prinsipil bekerja pada suatu ekosistem yang melibatkan banyak stakeholder, dan bertujuan untuk menciptakan berbagai inovasi. Lingkungan internal dan eksternal dalam

	ini; Terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data centre. Di satu sisi belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan smart government; Belum terdapat layanan Kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi. <i>Open Government</i>, Pemerintah Kota Bandung komitmen dalam penerapan <i>Open Data</i> melalui portal <i>Open Data</i>; Penggunaan <i>open apps</i> belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Bandung; Belum ada kebijakan/SOP keamanan informasi dalam penerapan <i>smart government</i>. Pernah terjadi beberapa <i>website</i> OPD tertentu diserang <i>hacker</i>. Dalam penerapan <i>Open Government</i> masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain: pegawai yang malas melakukan <i>update</i> data dan masih ada OPD tertentu yang memiliki ego sektoral dalam hal <i>sharing</i> data kepada Diskominfo.	<i>Data. Awareness</i>, Dalam hal pelaksanaan sosialisasi, <i>Open Data</i> Kota Bandung melaksanakan sosialisasi tersebut tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga sosialisasi dilakukan kepada internal Pemerintah Kota Bandung. <i>Government Responsibility</i>, Dalam hal dukungan dari pimpinan pemerintah, <i>Open Data</i> Kota Bandung untuk implementasi inisiatif <i>Open Data</i> Kota Bandung dan juga inisiatif Satu Data Indonesia dari Pemerintah Pusat sudah ada sejak 2015 dan diharapkan bahwa seluruh instansi untuk dapat mensukseskan <i>Open Government</i> data Kota Bandung dengan berpartisipasi serta tidak hanya membebaskan kepada instansi tertentu.	model ini bertindak sebagai pengguna data (data demand), dan berperan sebagai intermediaries (penerjemahan, pengkontekstualisasian data) baik itu orang, kelompok, atau Lembaga yang memiliki pemahaman atas pengolahan data. Dalam konteks OD baik intranet maupun ekstranet sama-sama pentingnya untuk dikelola. Jikaintranet mengelola pendistribusian dokumen internal, seperti manual, prosedur, dsb, maka ekstranet memungkinkan distribusi informasi, kolaborasi, dan transaksi dengan partner eksternal (Milner, 2000). Pengelolaan OD secara internal di pemerintah daerah bukan sekedar memenuhi pelayanan publik, tetapi juga sebagai penentu kuantitas dan kualitas data yang diunggah di portal Satu Data milik daerah, dan yang dikirim ke portal Satu Data di pemerintah pusat yang penting bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Untuk itu model yang tepat bagi manajemen inovasi OD intranet menjadi penting. Model ini menggambarkan OD yang terintegrasi dalam konsep pelayanan informasi publik. Keterlibatan jajaran PPID dalam OD diperkuat dalam struktur tersebut.
Penjelasan Keunggulan Penelitian Yang Kita Lakukan (ReSearch Gap)	Penelitian yang dilakukan oleh Eko, et., all ini mendeskripsikan maupun mengeksplorasi bagaimana penerapan <i>smart government</i> di Kota Bandung tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan <i>smart</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Yudan, et., al. ini berfokus pada implementasi <i>Open Government data</i> yang efektif di Kota Bandung. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pelaksanaan <i>Open Government</i> melalui	Penelitian yang dilakukan oleh Safaria, et., al., ini berfokus pada Model Inovasi Kolaboratif Dalam Implementasi Program <i>Open Data</i> Yang Berisi Mengenai Tantangan Dan Manfaatnya Bagi Public.

	<i>government</i> dalam mendukung terwujudnya <i>smart city</i> di Kota Bandung, khususnya pada penerapan <i>smart government</i>. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pelaksanaan <i>Open Government</i> melalui Portal <i>Open Data</i> Bandung khususnya pada Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik.	Portal <i>Open Data</i> Bandung khususnya pada Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik.	Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pelaksanaan <i>Open Government</i> melalui Portal <i>Open Data</i> Bandung khususnya pada Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik.
--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

2.1.2 Administrasi Publik

Penyelenggaraan administrasi yang berasaskan kemudahan, kepraktisan dan percepatan menjadi harapan bagi masyarakat luas. (Irva Yulia Rohmah et al., 2025). Sebenarnya, pelaksanaan administrasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana hal ini tidak bisa dipisahkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga di Indonesia.

Marliani L mendefinsikan administrasi sebagai berikut:

“Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrai juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya.” Marliani (2019)

Administrasi dalam arti sempit menurut Abdul Kadir:

“Administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggris dipergunakan istilah *clerical work, paper work, atau office work* atau administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi.”(Kadir, 2020)

Abdul Kadir juga mendefinisikan Administrasi dalam arti luas. Yakni

proses (rangkaian) kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu sebagai efisien. (Kadir, 2020)

John A. Vieg dalam Fritz Morstein Max (1959) “Dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud yang disadari” (Sayfri dalam Kadir, 2020). Sedangkan menurut Brooks Adams (1913) “Administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan” (Syafri dalam Kadir, 2020).

Pengertian mengenai administrasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan antara dua orang atau lebih yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan.

Administrasi Publik menurut Dwight Waldo adalah “Organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.” Sedangkan menurut Leonard D. White (1957) “Dalam arti luas administrasi publik terdiri dari semua kegiatan yang bermaksud melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum atas kebijakan negara” (Syafri dalam Kadir, 2020).

Selanjutnya dapat kita lihat definisi administrasi publik menurut Jean Claude Thoeing (2020) dalam bukunya *Public Administration in the Globalizing World* (2020), mendefinisikan administrasi publik sebagai "proses administratif yang melibatkan manajemen kebijakan publik dengan tujuan

untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.". Pengertian tersebut menekankan pada pengelolaan kebijakan publik untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Abdul Kadir berpendapat bahwa :

“Rumusan administrasi publik/ negara adalah ‘proses kerjasama kelompok orang yang terdiri dari aparatur negara, anggota legislatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat/LSM, kelompok kepentingan (*interest group*), organisasi profesi, media massa, atau masyarakat sipil lain dalam merumuskan, mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara secara efektif, efisien dan berkeadilan sosial’”. (Kadir, 2020)

Irva Yulia Rohmah et al. (2025) menjelaskan:

“Administrasi publik adalah sebuah disiplin yang terus berkembang dan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan kebijakan, pengorganisasian sumber daya, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Pandangan-pandangan terbaru yang ditawarkan oleh para ahli menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap administrasi. Dengan demikian, administrasi publik bukan hanya berfungsi sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan negara yang lebih baik. Namun dari beberapa hal tersebut memiliki satu tujuan yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

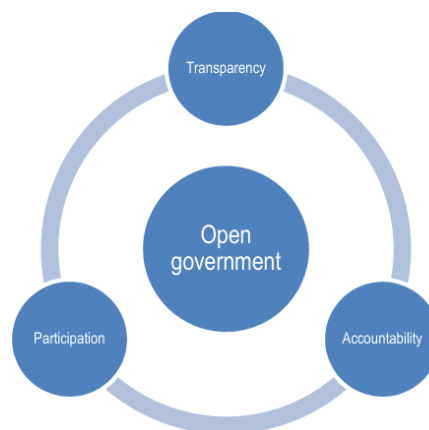
Penjelasan pengertian-pengertian dari administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah segala kegiatan yang dilakukan ditingkat negara dengan melibatkan beberapa stakeholder guna mencapai tujuan negara yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.3 *Open Government*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengartikan bahwa *Open Government* atau pemerintahan yang Terbuka sebagai sebuah bentuk transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan. (OECD, 2016)

Open Government menurut *Global Integrity* mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. (Pratiwi, 2018). Menurut Gulti prinsip *Open Government* dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik. (Gulti, 2015).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan bahwa prinsip *Open Government* atau pemerintahan yang terbuka itu terdiri dari tiga prinsip yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*accountability*), dan partisipasi (*participation*). Prinsip-Prinsip *Open Government* tersebut tergambar seperti gambar diagram dibawah:



Sumber: OECD (2016)

Gambar 2. 1 Diagram Prinsip-Prinsip *Open Government*

1. Transparansi pemerintah dipahami sebagai pengungkapan dan aksesibilitas selanjutnya dari data dan informasi pemerintah yang relevan. Fung, Graham dan Weil (2007) membedakan antara dua generasi kebijakan transparansi: generasi pertama mengacu pada pengungkapan catatan resmi untuk memastikan akses ke informasi bagi publik. Generasi ini berfokus pada undang-undang akses ke informasi, yang telah diterapkan oleh hampir semua negara anggota OECD (OECD, 2011). Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa akses tanpa hambatan ke informasi mengarah pada cara yang lebih baik bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Generasi kedua transparansi pemerintah, yang diciptakan Fung, Graham dan Weil (2007), "transparansi yang ditargetkan", mengacu pada ketersediaan informasi yang melayani tujuan konkret, dengan area yang terdefinisi dengan baik di mana informasi ini akan berkontribusi. Penting bagi pemerintah untuk bergerak menuju transparansi yang lebih terarah karena berkontribusi untuk meningkatkan kebijakan publik hanya jika informasi tersebut relevan, tepat waktu, dan berguna bagi kelompok pengguna yang ditargetkan dalam format yang bermanfaat.
2. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberi tahu warganya tentang keputusan yang dibuatnya serta untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan dan kinerja seluruh pemerintah dan pejabat publiknya.
3. Partisipasi biasanya mengacu pada keterlibatan individu dan kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek atau rencana. Dengan demikian, partisipasi mengacu pada gagasan bahwa untuk sepenuhnya menuai

manfaat dari interaksi aktif dengan penduduk mereka, pemerintah harus mengakui manfaat yang ditawarkan oleh semua aktor masyarakat, terutama warga negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam memberikan informasi dan berkonsultasi dan yang paling penting terlibat dengan mereka. Melibatkan warga secara aktif berkontribusi pada penggunaan sumber daya negara yang terbatas dan desain dan penyampaian layanan publik yang lebih baik.

Artikel yang dirilis oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dikatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*accountability*), dan partisipasi (*participation*), kini semakin menyatu dalam konsep *Open Government* atau pemerintahan yang terbuka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah mengakomodasi harapan dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (OECD, 2016)

Open Government Declaration (OGP, 2011) dalam (Huss & Keudel, 2020) dijelaskan bahwa Pemerintahan terbuka melibatkan meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan pemerintah; mendukung partisipasi sipil; menerapkan standar integritas profesional tertinggi dalam administrasi publik; meningkatkan akses ke teknologi baru untuk keterbukaan dan akuntabilitas.

Konsep pemerintahan terbuka atau *Open Government* telah berkembang menjadi gerakan signifikan di berbagai negara. Salah satu keuntungan dari pemerintahan terbuka adalah kemampuan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses data serta kegiatan pemerintah. Informasi mengenai peraturan dan

kebijakan pemerintahan dapat diakses dengan lebih mudah. Data terbuka ini terkait erat dengan penyebaran informasi pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk berbagai keperluan.

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: *Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government*” mengatakan bahwa terdapat tiga pilar dalam *Open Government*, yaitu *Transparency*; *Collaborative*; dan *Participatory*. (Obama, 2009; Gasco, 2015; Wirtz & Birkmeyer, 2015).

Arah dari pemerintahan terbuka bertransformasi menjadi sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi kesalahpahaman publik terkait informasi yang bersifat publik. Berdasarkan hal ini, terdapat tiga arah yang berbeda yang mengarah pada implementasi pemerintahan terbuka.

Arah pertama dan landasan utama didasarkan pada gagasan Kebebasan Informasi. Dokumen pemerintah harus tersedia untuk siapa saja. Namun tampaknya karena Perang Dingin, ini tidak mungkin dan kerahasiaan pemerintah tetap ada. Arah utama ini difokuskan pada hak hukum yang dimiliki warga negara untuk mengakses informasi pemerintah. Informasi seperti ini yang dihasilkan oleh administrasi publik harus dianggap sebagai bagian dari domain publik.

Arah kedua adalah ranah administrasi publik sebagai alat informasi publik. Dalam arah ini, keterbukaan harus diartikan sebagai pencarian untuk mendeklasifikasi informasi dan pengelolaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan publik dan pengadaan informasi atau

deregulasi. Dengan pengertian yang lebih operatif dan regulasi, jalur ini mengoperasionalkan gagasan *Open Government* dalam organisasi publiknya. Arah ketiga adalah informasi yang mendetail, dimana dalam memahami gagasan *Open Government* penting adanya keterbukaan masukkan atau data yang digunakan untuk pejabat pemerintah namun masih bisa diakses oleh warga negara.

Ketiga arah ini berusaha mencapai transparansi sebagai tujuan utama. Proses transparansi seharusnya mengara pada pemerintahan yang lebih baik dan kinerja pemerintahan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Gagasan yang mengatakan bahwa legitimasi otoritas publik ada di beberapa bagian salah satunya pada transparansi.

2.1.4 Data

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menjelaskan Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, darr/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2025) mendefinisikan data sebagai keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

Sidauruk & Hamdi (2015) menyatakan “data” pada prinsipnya adalah seluruh informasi atau rekaman elektronik yang meliputi dokumen, database, kontrak, transkrip, atau rekaman gambar dan suara dari suatu kejadian. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data terbuka dan data dikecualikan.

Data Terbuka (*Open Data*) diharapkan dapat mendukung proses penyusunan kebijakan serta memperbaiki kualitas layanan publik dalam aspek informasi. Data Terbuka ini merupakan suatu inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari inisiatif Gerakan *Open Government* Indonesia (OGI). (Safaria et al., 2019)

Open Government Indonesia (OGI) sebagai gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, dengan merujuk pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Open Data (OD) mengacu pada prinsip data publik (yang dikumpulkan, dipelihara, dan digunakan oleh badan pemerintah) yang harus tersedia untuk diakses dan digunakan kembali oleh warga dan perusahaan (Monino dan Sedkaoui, 2016). Sementara menurut *Open Knowledge Foundation Network* (OKFN) *Open Data* adalah data yang secara publik tersedia dan bebas bagi siapapun untuk menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusi (*to use-reuse-redistribution*). Data yang dimaksud dapat milik publik maupun bukan, yang bebas diakses siapapun dan digunakan untuk keperluan apapun (OKFN, 2010).

Implementasi *Open Data* (OD) yang diterapkan oleh suatu pemerintah dapat diperiksa melalui enam prinsip yang tercantum dalam piagam *Open Data/the Principles of the Open Data Charter* (*Open Data Barometer*, 2017), yaitu:

1. Terbuka secara default (*Open by default*), yaitu pemerintah secara aktif harus mengumumkan atau mempublikasikan informasi tersebut tanpa dipinta, dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang harus ditutup/dikecualikan, karena alasan keamanan atau perlindungan data;
2. Tepat waktu dan Komprehensif (*Timely and Comprehensive*) agar data tetap berharga atau bernilai, karena masih relevan, menyeluruh, dan harus dalam bentuk aslinya tanpa dimodifikasi;
3. Dapat diakses dan dapat digunakan (*Accessible and Usable*) melalui portal khusus yang mudah ditemukan, bebas biaya, dengan lisensi terbuka (tidak perlu izin khusus untuk mengakses dan membukanya);
4. Sebanding dan *Interoperable* (*Comparable and Interoperable*), yaitu melalui standar data yang disepakati bersama. Jika semakin banyak dataset berkualitas baik yang dapat diakses, maka semakin mudah bagi dataset tersebut untuk berbicara satu sama lain (*interoperable*). Dengan demikian semakin banyak nilai potensial yang bisa didapatkan darinya;
5. Bertujuan untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Keterlibatan Warga negara (*For Improved Governance & Citizen Engagement*) karena memiliki kapasitas yang memungkinkan warga negara (dan instansi pemerintah lainnya) untuk memiliki gagasan yang lebih baik tentang cara memperbaiki layanan publik dan membantu pemerintah untuk bertanggung jawab;
6. Untuk Pengembangan dan Inovasi Inklusif (*For Inclusive Development and Innovation*) karena *Open Data* (OD) dapat membantu memacu perkembangan ekonomi inklusif. Berdasarkan hasil kajian ODI (*The Open Data Institute*), *Open*

Data (OD) telah terbukti bermanfaat bagi ekonomi dan warga Negara (OKFN, n.d).

Selain prinsip-prinsip tersebut pelaksanaan *Open Data* (OD) di Indonesia juga harus merujuk kepada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai pedomannya. Berikut adalah prinsip-prinsip pada KIP:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informas Publik;
2. Badan Publik yang memiliki situs resmi wajib mengumumkan informasi berkala melalui *website*;
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia, ketat dan terbatas (yang dapat membahayakan negara, yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan);
4. Ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Badan Publik;
5. SOP layanan informasi publik harus dimiliki Badan publik;
6. Badan publik harus memiliki Daftar Informasi Publik (DIP);
7. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Prinsip *Open Data* (OD) dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu keduanya mengharuskan adanya ketersediaan dan akses yang efisien terhadap informasi serta memperhatikan data yang bersifat

rahasia. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya; Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak mengatur format data untuk digunakan kembali dan didistribusikan, sementara dalam *Open Data* (OD) tidak terdapat kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi data. (Safaria et al., 2019)

Kemudian terdapat juga perbedaan dalam prosedurnya. Prosedur *Open Data* (OD) terdiri atas: membangun aplikasi, membuka data, membuat visualisasi dan mempublikasikan analisis dengan menggunakan data publik. Sementara Prosedur Keterbukaan Informasi Publik (KIP), berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), terdiri atas: mengklasifikasi informasi, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), melakukan uji konsekuensi atas informasi rahasia/dikecualikan, mengumumkan informasi publik (berdasarkan klasifikasi), dan melayani permohonan informasi. (Safaria et al., 2019)

Open Data (OD) yang dilakukan di Kota Bandung dijalankan melalui Portal *Open Data* Bandung. Portal *Open Data* Bandung ini merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung. Peluncuran Portal Data Kota Bandung <http://databandung.go.id> pada tanggal 11 Desember 2015.

Website Portal *Open Data* Bandung mengatakan ketersediaan *Open Data* Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data pemerintah yang akurat dan terbuka untuk secara mudah diakses oleh masyarakat dalam sebuah portal data resmi milik Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Tujuan dari *Open Data* Bandung adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta partisipasi masyarakat Bandung dalam

memanfaatkan ketersediaan data yang akurat, melalui Ketersediaan data prioritas dan universal yang bersifat publik dengan satu standar data, format, metadata baku, dan satu portal data dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; Pengembangan layanan data pemerintah yang mana tidak hanya menjadi sarana transparansi pengelolaan data antar organisasi pemerintah daerah dan kewilayahan melainkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat di Jawa Kota Bandung dalam pemanfaatan data secara berkelanjutan; dan Pengembangan layanan komunikasi untuk kemudahan akses data yang akurat antara pemerintah dan Warga Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

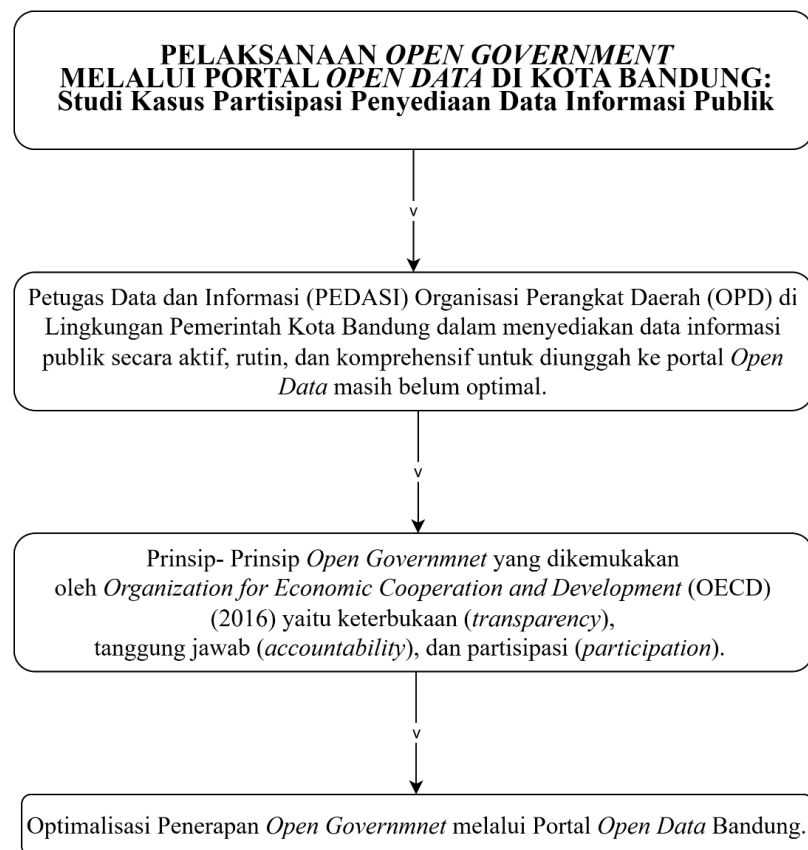
Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan pondasi pemikiran dalam penelitian yang dirumuskan dari fakta-fakta, pengamatan, dan studi pustaka. Dengan demikian, kerangka pemikiran mengandung teori, argumen, atau konsep konsep yang akan digunakan sebagai pondasi dalam penelitian. Dalam konteks pemikiran, variabel-variabel yang diteliti dijabarkan dengan rinci dan berkaitan erat dengan isu yang sedang diteliti, sehingga dapat menjadi landasan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. (Syahputri et al., 2023)

Penelitian Pelaksanaan *Open Government* melalui Portal *Open Data* Bandung di Kota Bandung: Studi Kasus Data Pendidikan ini didasarkan berdasarkan prinsip-prinsip *Open Government* yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*accountability*), dan partisipasi (*participation*).

1. Transparansi pemerintah dipahami sebagai pengungkapan dan aksesibilitas selanjutnya dari data dan informasi pemerintah yang relevan. Fung, Graham dan Weil (2007) membedakan antara dua generasi kebijakan transparansi: generasi pertama mengacu pada pengungkapan catatan resmi untuk memastikan akses ke informasi bagi publik. Generasi ini berfokus pada undang-undang akses ke informasi, yang telah diterapkan oleh hampir semua negara anggota OECD (OECD, 2011). Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa akses tanpa hambatan ke informasi mengarah pada cara yang lebih baik bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Generasi kedua transparansi pemerintah, yang diciptakan Fung, Graham dan Weil (2007), "transparansi yang ditargetkan", mengacu pada ketersediaan informasi yang melayani tujuan konkret, dengan area yang terdefinisi dengan baik di mana informasi ini akan berkontribusi. Penting bagi pemerintah untuk bergerak menuju transparansi yang lebih terarah karena berkontribusi untuk meningkatkan kebijakan publik hanya jika informasi tersebut relevan, tepat waktu, dan berguna bagi kelompok pengguna yang ditargetkan dalam format yang bermanfaat.
2. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberi tahu warganya tentang keputusan yang dibuatnya serta untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan dan kinerja seluruh pemerintah dan pejabat publiknya.
3. Partisipasi biasanya mengacu pada keterlibatan individu dan kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek atau rencana. Dengan demikian, partisipasi mengacu pada gagasan bahwa untuk sepenuhnya menuai

manfaat dari interaksi aktif dengan penduduk mereka, pemerintah harus mengakui manfaat yang ditawarkan oleh semua aktor masyarakat, terutama warga negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam memberikan informasi dan berkonsultasi dan yang paling penting terlibat dengan mereka. Melibatkan warga secara aktif berkontribusi pada penggunaan sumber daya negara yang terbatas dan desain dan penyampaian layanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan teori tersebut, maka peneliti membuat gambar paradigma berpikir penelitian, seperti gambar bawah ini:



Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Gambar 2. 2 Gambar Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Peneliti membuat proposisi atau dugaan sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Maka peneliti membuat proposisi dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan permasalahan, yaitu adanya pelaksanaan *Open Government* di Kota Bandung melalui Portal *Open Data* Bandung yang optimal jika dilaksanakan dengan Prinsip *Open Government* menurut (OECD, 2016) yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*accountability*), dan partisipasi (*participation*).

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Objek penelitian dalam konteks ini adalah elemen yang bisa berupa individu, organisasi, atau benda yang menjadi subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

3.1.1 Sejarah, Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

Pada mulanya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan, yaitu Badan Komunikasi dan Informatika dengan Singkatan BAKOMINFO. BAKOMINFO Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007. Serta merupakan penggabungan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian BAKOMINFO terbentuk sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 07 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

1. Visi “Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kota bandung sebagai kota jasa bermartabat”.

2. Misi:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
- 2) Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis;
- 3) Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan

Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu; berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
2. Pelaksanakan kebijakan lingkup, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika, persandian dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung

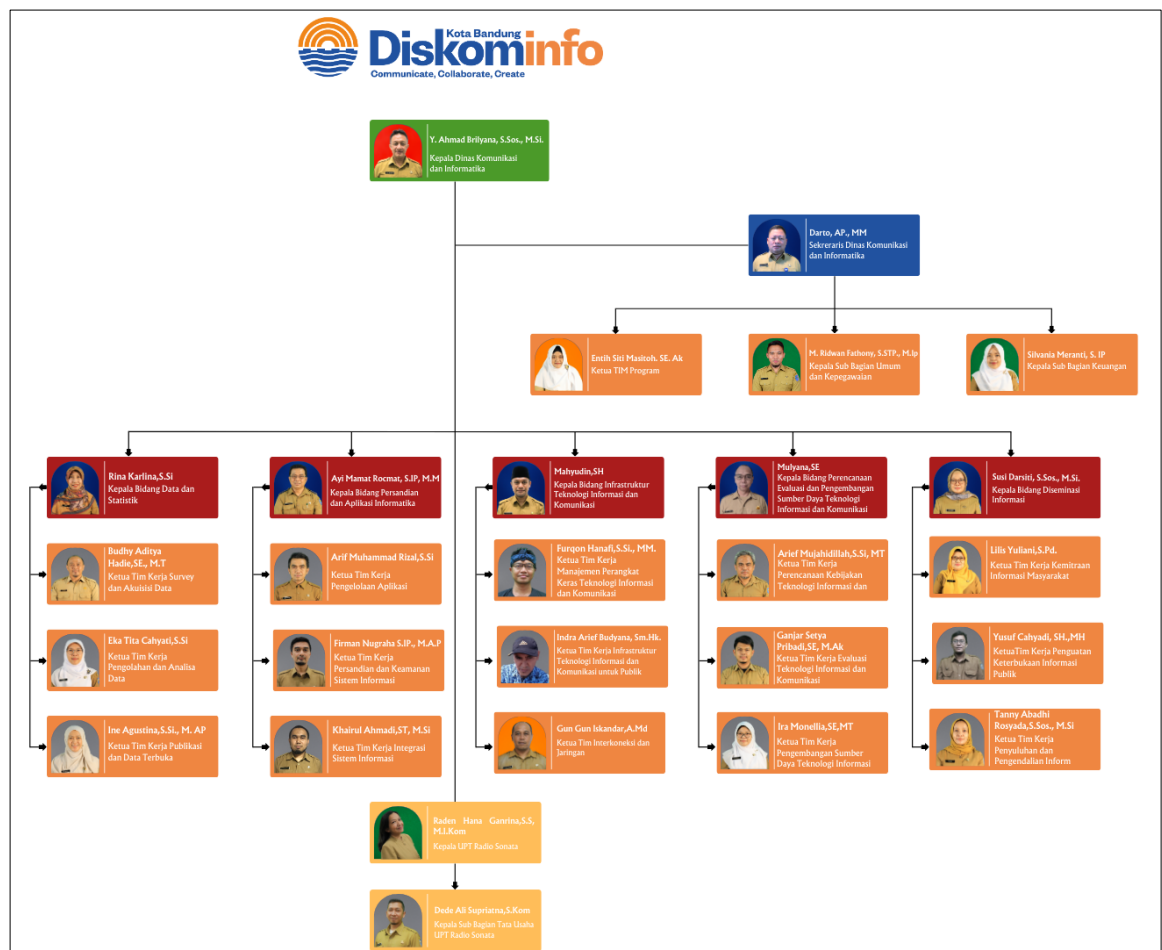
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretaris, membawahi:

- 1) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub. Bagian Keuangan
 - 3) Kelompok Substansi program
2. Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi :
 - 1) Kelompok Substansi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Kelompok Subtansi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunkasi;
 - 3) Kelompok Subtansi Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Bidang Infrastruktur TIK membawahi:
 - 1) Kelompok Subtansi Interkoneksi dan Jaringan;
 - 2) Kelompok Subtansi Manajemen Perangkat keras TIK
 - 3) Kelompok Subtansi Infrastruktur TIK untuk Publik
4. Bidang Diseminasi Informasi
 - 1) Kelompok Subtansi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi
 - 2) Kelompok Subtansi Keterbukaan Informasi Publik
 - 3) Kelompok Subtansi Kemitraan Informasi Masyarakat
5. Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi membawahi:
 - 1) Kelompok Subtansi Pengelolaan Aplikasi;
 - 2) Kelompok Subtansi Integrasi Sistem Informasi; dan
 - 3) Kelompok Subtansi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
6. Bidang Data dan Statistik, membawahi:
 - 1) Kelompok Subtansi Survei dan Akuisisi Data;

- 2) Kelompok Subtansi Pengolahan dan Analisa Data;
 - 3) Kelompok Subtansi Publikasi dan Data Terbuka.
7. UPT Radio Sonata, Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (2025)

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

3.1.4 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

Kota Bandung

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sumber daya sarana dan

prasarana. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 76 orang Pegawai Negeri Sipil.

Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat dikualifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu berdasarkan:

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan Eselon Jabatan.

Tabel 3. 1 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Berdasarkan Eselon Jabatan

Eselon	Jumlah
II.B	1
III.A	1
III.B	4
IV.A	18
IV.B	1
Fungsional Umum	38
Fungsional Tertentu	13

Sumber: Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (2025)

Berdasarkan table diatas, dari jumlah pegawai sebanyak 76 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Sub Koordinator dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 38 orang serta fungsional tertentu sebanyak 13 orang.

2. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 3. 2 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SLTA	4	5
D3	5	7
S1	45	59
S2	22	29

Sumber: Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (2025)

Berdasarkan tabel diatas, Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 22 orang (29%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 45 orang (59%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 5 orang (7%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang (5,89%), SLTA sebanyak 4 orang (5%).

3.1.5 Data Pelaksanaan *Open Government* melalui *Open Data* di Kota Bandung: Studi Kasus Partisipasi Penyediaan Data Informasi Publik.

Open Government Indonesia (OGI) sebagai gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Data Terbuka (*Open Data*) diharapkan dapat mendukung proses penyusunan kebijakan serta memperbaiki kualitas layanan publik dalam aspek informasi. Data Terbuka ini merupakan suatu inovasi yang dihadirkan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari inisiatif Gerakan *Open Government* Indonesia (OGI). (Safaria et al., 2019)

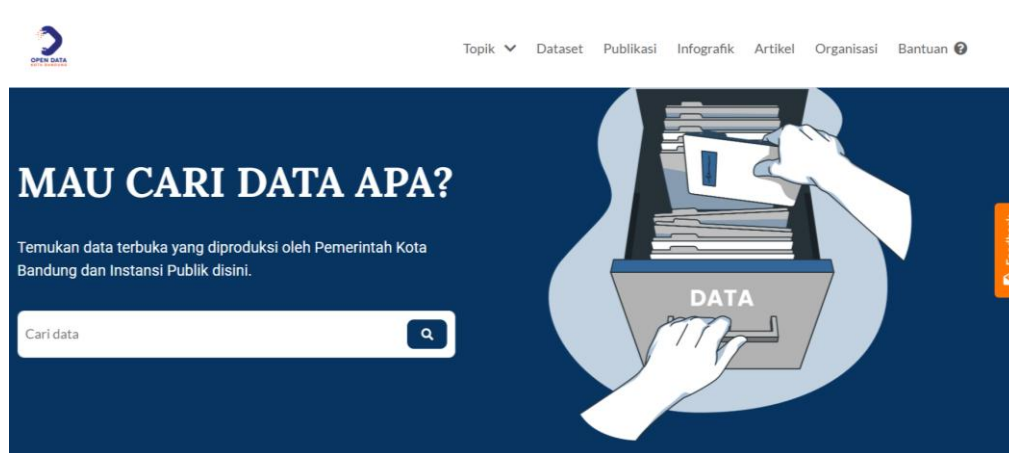
Open Data (OD) mengacu pada prinsip data publik (yang dikumpulkan, dipelihara, dan digunakan oleh badan pemerintah) yang harus tersedia untuk diakses dan digunakan kembali oleh warga dan perusahaan (Monino dan Sedkaoui, 2016). Sementara menurut *Open Knowledge Foundation Network* (OKFN) *Open Data* adalah data yang secara publik tersedia dan bebas bagi siapapun untuk menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusi (*to use-reuse-redistribution*). Data yang dimaksud dapat milik publik maupun bukan, yang bebas diakses siapapun dan digunakan untuk keperluan apapun (OKFN, 2010).

Pelaksanaan *Open Data* (OD) di Indonesia harus merujuk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai pedomannya. Berikut adalah prinsip-prinsip pada Keterbukaan Informasi Publik (KIP):

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Badan Publik yang memiliki situs resmi wajib mengumumkan informasi berkala melalui *website*;
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia, ketat dan terbatas (yang dapat membahayakan negara, yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan);

4. Ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Badan Publik;
5. SOP layanan informasi publik harus dimiliki Badan publik;
6. Badan publik harus memiliki Daftar Informasi Publik (DIP);
7. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Open Government yang dilakukan di Kota Bandung dijalankan melalui Portal *Open Data* Bandung. Portal *Open Data* Bandung ini merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung. Portal Data Kota Bandung <http://databandung.go.id> diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2015. Tampilan antarmuka utama Portal *Open Data* Bandung dapat terlihat seperti gambar dibawah ini:

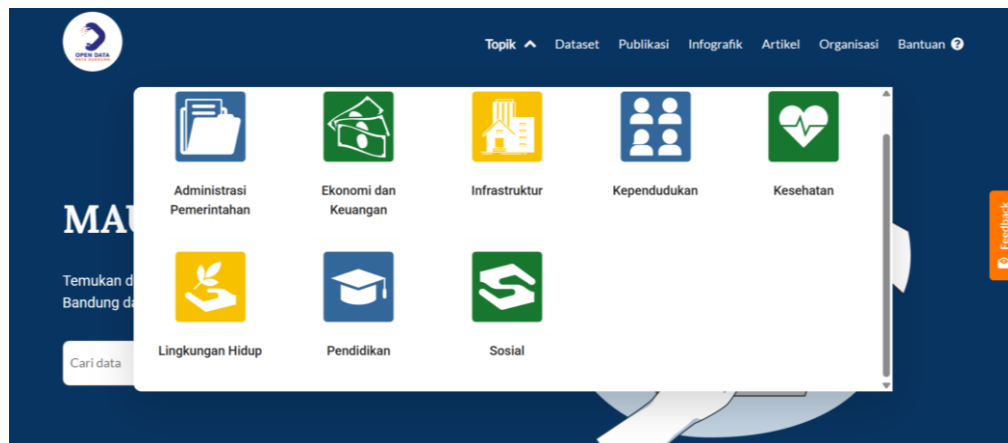


Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 2 Tampilan Utama Antarmuka Portal *Open Data* Bandung

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Tampilan Utama Portal *Open Data* Bandung menampilkan beberapa menu lainnya seperti Topik, Dataset, Publikasi, Infografis, Artikel, Organisasi, dan Bantuan. Selain 7 menu tersebut

Tampilan Utama Portal *Open Data* juga menampilkan fitur *Feedback* atau umpan balik dan fitur *Search bar*. Berikut tampilan menu Topik pada Portal *Open Data*:



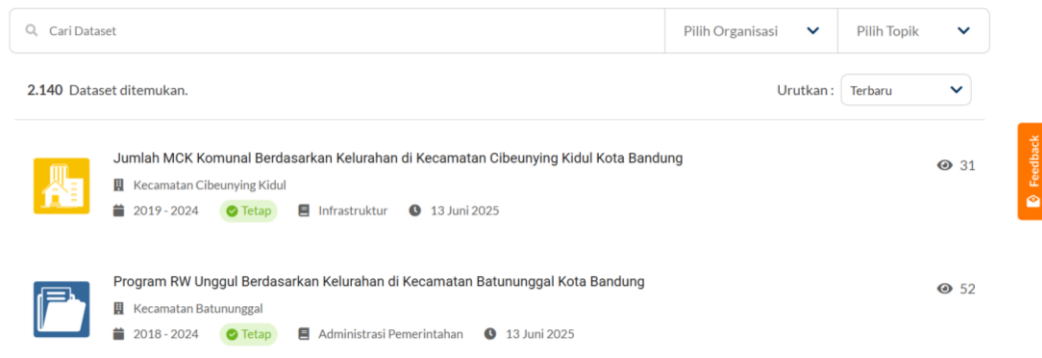
Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 3 Tampilan Antarmuka Menu Topik Portal *Open Data*

Tampilan Menu Topik pada Portal *Open Data* menampilkan delapan (8) pilihan kategori topik. Dalam tampilan menu tersebut data yang tersedia di Portal *Open Data* diklasifikasikan kedalam delapan (8) kategori tematik, seperti Administrasi Pemerintahan; Ekonomi dan Keuangan; Infrastuktur; Kependudukan; Kesehatan; Lingkungan Hidup; Pendidikan; dan Sosial.

Menu Topik ini dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari informasi berdasarkan topik-topik yang tersedia, yang dapat mempermudah pengguna dalam menemukan dataset sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Selain itu ikon yang digunakan pada tampilan menu topik ini juga sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna.

Menu lainnya yang terdapat pada Portal *Open Data* adalah menu Dataset. Tampilan antarmuka Menu Dataset dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

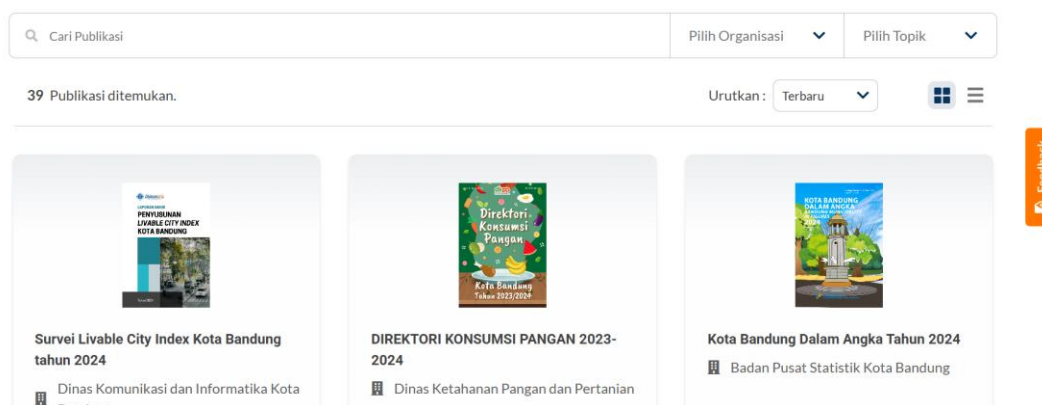


Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 4 Tampilan Antarmuka Menu Dataset Portal Open Data

Menu Dataset berfungsi untuk menampilkan daftar data-data mentah, yang tersedia dalam bentuk tabel yang bisa diolah lebih lanjut didalam portal. Menu Dataset menyediakan beberapa fitur, yaitu fitur *Search bar*; fitur filter berdasarkan Organisasi; fitur filter berdasarkan topik; dan fitur urutkan berdasarkan abjad, terbaru, diunduh terbanyak, dan dilihat terbanyak. Fitur-fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan data secara efisien sesuai dengan kebutuhannya.

Menu selanjutnya yang terdapat pada Portal *Open Data* adalah menu Publikasi. Tampilan menu Publikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

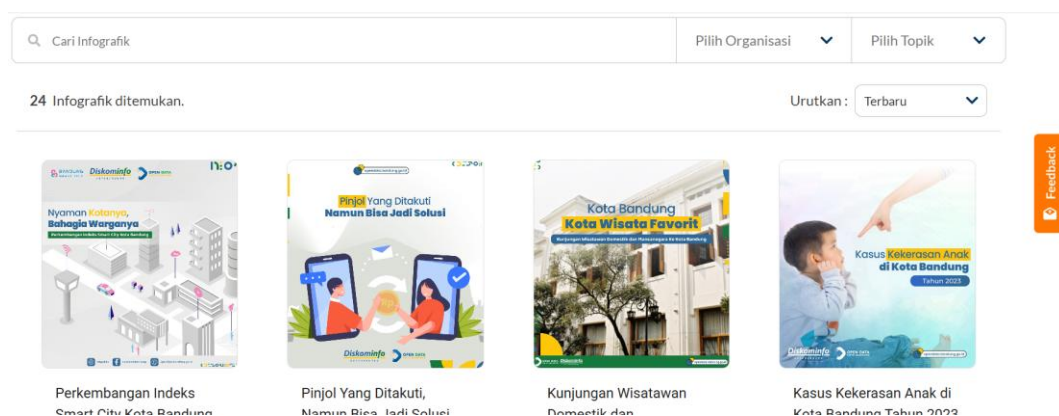


Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 5 Tampilan Antarmuka Menu Publikasi Portal Open Data

Menu Publikasi pada Portal *Open Data* berfungsi menampilkan kumpulan publikasi dokumen perencanaan, Daerah dalam Angka, dan publikasi lainnya dari pemerintah untuk memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi terkini. Dalam tampilan antarmuka menu Publikasi pada Portal *Open Data* menyediakan berbagai fitur, antara lain fitur *Search bar*; fitur filter berdasarkan organisasi; fitur filter berdasarkan topik; dan fitur pilihan untuk mengurutkan publikasi berdasarkan berdasarkan abjad, berdasarkan unggahan terbaru, berdasarkan jumlah unduhan terbanyak.

Selain itu penyajian publikasi dokumen perencanaan, Daerah dalam Angka, dan publikasi lainnya dari pemerintah pada menu Publikasi di Portal *Open Data* ini dapat ditampilkan dengan susunan *grid* atau kisi-kisi ataupun ditampilkan dengan susunan *list* atau daftar. Fitur-fitur yang tersedia ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan informasi secara efisien sesuai dengan kebutuhannya. Menu Infografik dalam Portal *Open Data* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



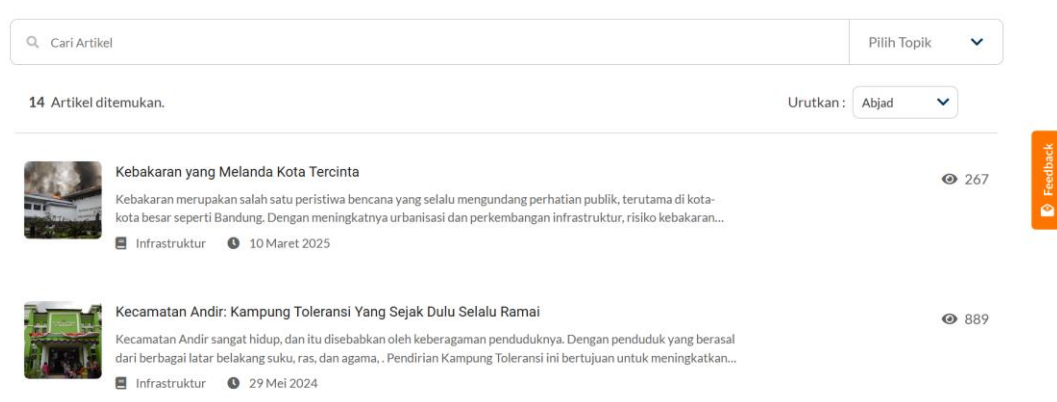
Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 6 Tampilan Antarmuka Menu Infografik Portal *Open Data*

Menu Infografik pada Portal *Open Data* ini berfungsi untuk menampilkan informasi dan data dalam bentuk grafik yang mudah dipahami dan menarik. Dalam tampilan antarmuka menu Infografik pada Portal *Open Data* menyediakan berbagai fitur, antara lain fitur *Search bar*; fitur filter berdasarkan organisasi; fitur filter berdasarkan topik; dan fitur pilihan untuk mengurutkan publikasi berdasarkan berdasarkan abjad, berdasarkan dibagikan terbanyak, dan berdasarkan dilihat terbanyak.

Fitur-fitur yang disediakan dalam menu ini memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menelusuri, mengakses, dan memanfaatkan informasi secara optimal. Selain itu, pengguna juga dimudahkan dalam menyebarluaskan data yang ditemukan, sehingga proses distribusi informasi menjadi lebih efisien dan terarah.

Menu selanjutnya yang terdapat pada Portal *Open Data* yaitu menu Artikel, menu Artikel pada Portal *Open Data* berfungsi untuk menampilkan kumpulan berbagai data dan informasi dalam bentuk artikel. Tampilan antarmuka menu artikel dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



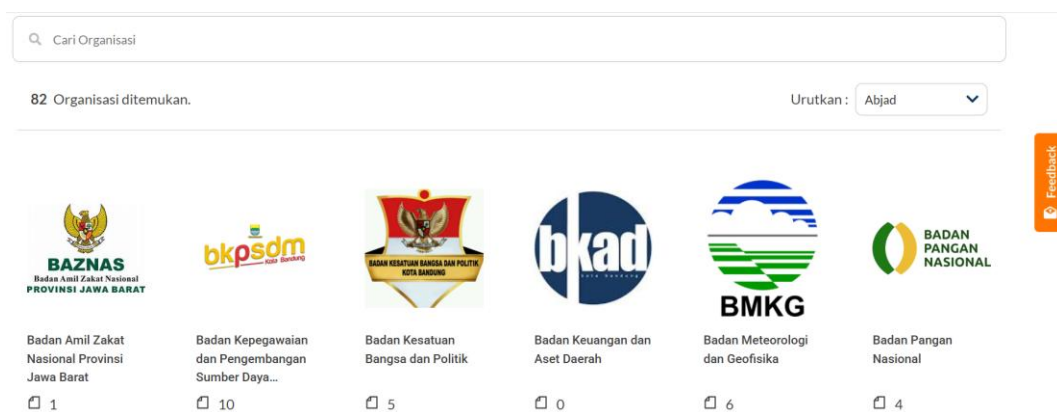
Sumber: *website Open Data* <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 7 Tampilan Antarmuka Menu Artikel Portal *Open Data*

Menu artikel memiliki berbagai fitur, antara lain adalah fitur *Search bar*; fitur filter berdasarkan pilihan topik; fitur untuk mengurutkan artikel berdasarkan abjad, berdasarkan unggahan terbaru, berdasarkan terbanyak dibagikan, dan berdasarkan terbanyak dilihat atau dikunjungi.

Fitur-fitur yang disediakan dalam menu ini memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menelusuri, mengakses, dan memanfaatkan informasi secara optimal. Selain itu, pengguna juga dimudahkan dalam menyebarluaskan data yang ditemukan, sehingga proses distribusi informasi menjadi lebih efisien dan terarah.

Menu selanjutnya yang terdapat pada Portal *Open Data* adalah menu organisasi. Menu organisasi tersebut berfungsi untuk menampilkan daftar organisasi yang berpartisipasi dalam Portal *Open Data*. Tampilan antarmuka menu organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



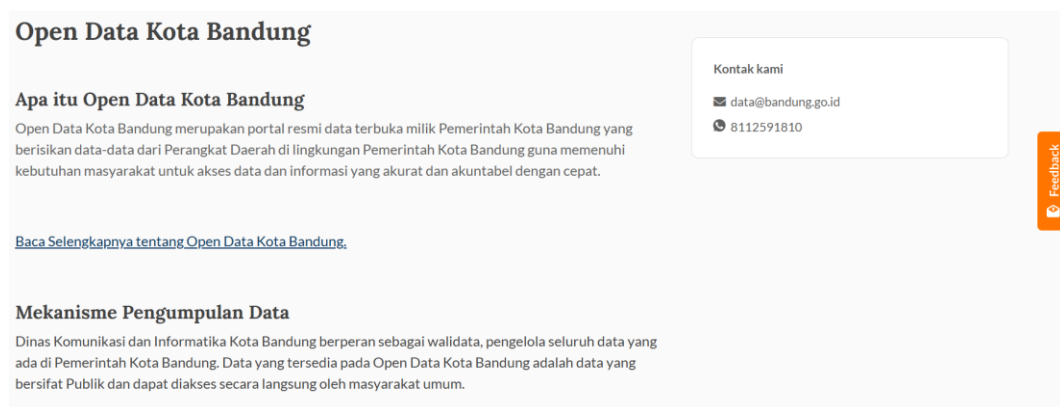
Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 8 Tampilan Antarmuka Menu Organisasi Portal Open Data

Menu organisasi ini menyediakan beberapa fitur, yaitu fitur kolom pencarian atau *Search bar*; dan fitur untuk mengurutkan daftar organisasi berdasarkan abjad dan berdasarkan unggahan dataset terbanyak. Terdapat ikon logo juga pada setiap daftar organisasi yang berpartisipasi. Fitur-fitur ini memberikan

fleksibilitas bagi pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan data secara efisien sesuai dengan kebutuhannya.

Menu berikutnya yang terdapat pada Portal *Open Data* adalah menu Bantuan. Menu Bantuan ini berfungsi untuk menampilkan bantuan dan Dokumentasi mengenai Open Data Kota Bandung. Menu Bantuan pada Portal *Open Data* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

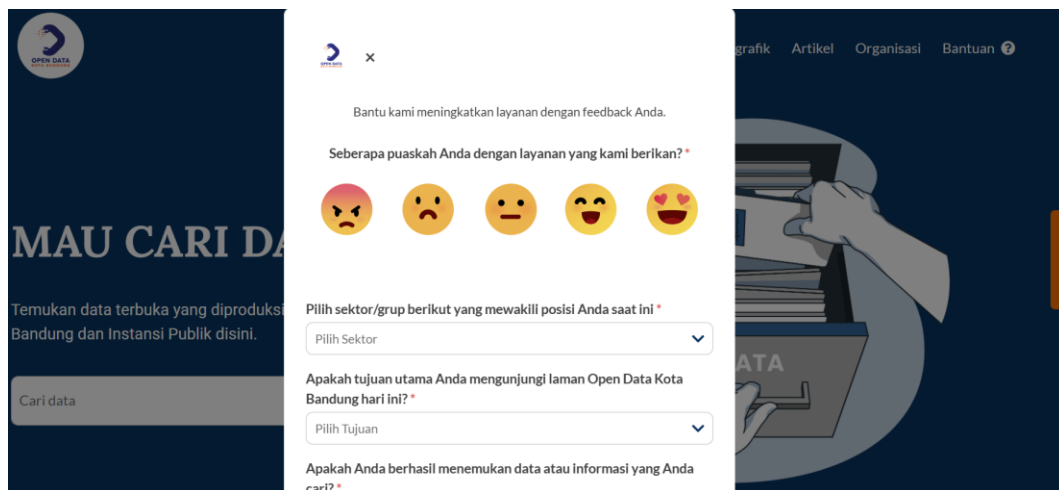


Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 9 Tampilan Antarmuka Menu Organisasi Portal *Open Data*

Menu bantuan pada Portal *Open Data* ini menampilkan penjelasan mengenai apa itu *Open Data* Kota Bandung serta penjelasan mengenai mekanisme dalam pengumpulan data. Selain itu pada menu Bantuan ini juga tercantum informasi kontak resmi yaitu *email* dan nomor yang langsung terhubung pada kontak *WhatsApp*. Kontak resmi tersebut dapat dihubungi apabila pengguna membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut terkait penggunaan portal.

Selain tujuh (7) menu tersebut, terdapat juga fitur umpan balik atau *Feedback* pada Portal *Open Data*. Tombol fitur *Feedback* ini muncul pada setiap menu yang ada di Portal *Open Data*. Tampilan fitur umpan balik atau *Feedback* dapat terlihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: website Open Data <http://databandung.go.id> (2025)

Gambar 3. 10 Tampilan Antarmuka Fitur *Feedback* Portal Open Data

Fitur *Feedback* pada Portal *Open Data* ini ditujukan untuk menjangkau masukan dari pengguna secara langsung. Fitur *Feedback* yang tersedia ini muncul dalam bentuk *pop-up* dan mengajak pengunjung untuk menilai sejauh mana mereka merasa puas terhadap layanan yang disediakan oleh portal. Penilaian diberikan melalui pilihan ikon ekspresi wajah, mulai dari sangat tidak puas hingga sangat puas.

Selanjutnya, pengguna diarahkan untuk mengisi informasi tambahan seperti sektor atau kelompok asal pengguna, tujuan utama kunjungan ke portal, serta pertanyaan mengenai apakah pengguna berhasil menemukan data yang dicari dan apakah informasi tersebut mudah didapatkan.

Tidak hanya itu, fitur ini juga menyediakan kolom terbuka bagi pengguna untuk menuliskan saran atau kendala yang mereka alami selama mengakses portal. Tersedia pula kolom opsional bagi pengguna yang bersedia dihubungi kembali melalui email untuk keperluan diskusi atau tindak lanjut dari pihak pengelola Open Data Kota Bandung.

Website Portal Open Data Bandung mengatakan ketersediaan *Open Data* Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data pemerintah yang akurat dan terbuka untuk secara mudah diakses oleh masyarakat dalam sebuah portal data resmi milik Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Tujuan dari Portal *Open Data* Bandung adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Bandung dan partisipasi masyarakat Kota Bandung. Partiasipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Bandung terlaksana melalui menyediakan data informasi publik dalam Portal *Open Data*, sedangkan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam Portal *Open Data* terlaksana melalui memanfaatkan ketersediaan data.

Tujuan tersebut dapat terlaksana melalui Ketersediaan data prioritas dan universal yang bersifat publik dengan satu standar data, format, metadata baku, dan satu portal data dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; Pengembangan layanan data pemerintah yang mana tidak hanya menjadi sarana transparansi pengelolaan data antar organisasi pemerintah daerah dan kewilayahan melainkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat di Jawa Barat Kota Bandung dalam pemanfaatan data secara berkelanjutan; dan Pengembangan layanan komunikasi untuk kemudahan akses data yang akurat antara pemerintah dan Warga Bandung.

Dataset yang saat ini tersedia di Portal *Open Data* Bandung terdapat sebanyak 2.256 (per bulan april) yang terbagi dalam 8 topik yaitu yaitu Administrasi Pemerintahan; Ekonomi dan Keuangan; Infrastuktur; Kependudukan; Kesehatan;

Lingkungan Hidup; Pendidikan; dan Sosial. Secara lebih rinci berikut tabel yang menerangkan jumlah dataset yang tersedia pada Portal *Open Data* Bandung berdasarkan 8 topik yang ada.

Tabel 3. 3 Jumlah Dataset Berdasarkan Topik

No	Topik	Jumlah Dataset
1	Sosial	831
2	Ekonomi dan Keuangan	401
3	Infrastruktur	292
4	Lingkungan Hidup	268
5	Administrasi Pemerintahan	173
6	Kesehatan	173
7	Pendidikan	71
8	Kependudukan	47

Sumber: Laporan Tenaga Ahli Administrator DISKOMINFO Kota Bandung (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah dataset antar topik memiliki perbedaan yang cukup jauh. Pada topik sosial terdapat 831 dataset; sedangkan pada topik Ekonomi dan Keuangan terdapat 401 dataset; pada topik Infrastruktur terdapat 292 dataset; topik Lingkungan Hidup terdapat 268 dataset; topik Administrasi Pemerintahan dan topik Kesehatan terdapat 173 dataset; topik Pendidikan terdapat 71 dataset; dan yang terakhir topik Kependudukan terdapat 47 dataset.

Selain melihat persebaran dataset berdasarkan topik, penting juga untuk menganalisis ketersediaan data berdasarkan organisasi penyedia atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkontribusi dalam penyediaan data terbuka, serta untuk mengidentifikasi apakah partisipasi pengunggahan data telah merata di seluruh perangkat daerah. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah dataset berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Tabel 3. 4 Jumlah Dataset Berdasarkan Perangkat Daerah

No	OPD	Jumlah Dataset
1	Dinas Kesehatan	90
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	68
3	Kecamatan Cibiru	59
4	Kecamatan Sukasari	58
5	Kecamatan Cibeunying Kaler	57
6	Kecamatan Gedebage	57
7	Kecamatan Bojongloa Kidul	56
8	Badan Pusat Statistik Kota Bandung	56
9	Kecamatan Arcamanik	55
10	Kecamatan Mandalajati	55
11	Kecamatan Antapani	55
12	Kecamatan Cicendo	55
13	Kecamatan Panyileukan	55
14	Kecamatan Regol	54
15	Kecamatan Cinambo	53
16	Kecamatan Sumur Bandung	53
17	Kecamatan Sukajadi	53
18	Kecamatan Coblong	53
19	Kecamatan Cibeunying Kidul	53
20	Kecamatan Andir	52
21	Kecamatan Bandung Kulon	51
22	Kecamatan Rancasari	50
23	Kecamatan Cidadap	49
24	Kecamatan Kiaracondong	49
25	Kecamatan Batununggal	48
26	Kecamatan Bandung Wetan	47
27	Kecamatan Buahbatu	46
28	Kecamatan Bandung Kidul	45
29	Kecamatan Ujungberung	45
30	Kecamatan Lengkong	42
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41
32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	38
33	Kecamatan Babakan Ciparay	38
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
35	Dinas Pendidikan	34
36	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung	34
37	Sekretariat Daerah	31
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	31
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31
40	Kecamatan Astananyar	29
41	Kecamatan Bojongloa Kaler	28
42	Dinas Perhubungan	27
43	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26
44	Kementerian Agama RI	20
45	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening	15
46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13
47	Dinas Pemuda dan Olahraga	12
48	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	12
49	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	12
50	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9
53	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9
54	Satuan Polisi Pamong Praja	8
55	Otoritas Jasa Keuangan	8
56	Dinas Ketenagakerjaan	8

No	OPD	Jumlah Dataset
57	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7
58	Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari	7
59	Dinas Lingkungan Hidup	6
60	Badan Meteorologi dan Geofisika	6
61	Dinas Sosial	5
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
63	Badan Pendapatan Daerah	4
64	Badan Pangan Nasional	4
65	Palang Merah Indonesia	4
66	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	4
67	Kementrian Agama Kota Bandung	3
68	Perusahaan Listrik Negara	2
69	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	2
70	Sekretariat DPRD	2
71	Pengadilan Militer II-09 Bandung	1
72	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	1
73	Pengadilan Agama Bandung	1
74	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat	1
75	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	1
76	Pengadilan Negeri Bandung	1
77	Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung	0
78	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0
79	Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung	0
80	Perumda Bank Bandung	0
81	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	0
82	Inspektorat Kota	0

Sumber: Laporan Tenaga Ahli Administrator DISKOMINFO Kota Bandung (2025)

Berdasarkan tabel jumlah dataset yang disediakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung, terdapat variasi signifikan dalam kontribusi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap penyediaan data terbuka melalui Portal *Open Data*. Dinas Kesehatan mendominasi dengan 90 dataset, diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan 68 dataset. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cibiru, Sukasari, dan Cibeunying Kaler menunjukkan jumlah dataset yang relatif tinggi, menunjukkan keterlibatan mereka dalam menyediakan data untuk publik.

Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya menyumbang sedikit atau bahkan tidak menyediakan dataset sama sekali, seperti Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening dan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang masing-masing hanya memiliki satu atau dua dataset, dan

beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang tidak menyumbangkan dataset sama sekali.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan prinsip partisipasi dalam penyediaan data terbuka. Ketimpangan kontribusi ini patut menjadi perhatian, sebab idealnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sebagaimana semangat *Open Government*. Minimnya keterlibatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mencerminkan adanya kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman atas urgensi keterbukaan data, hingga minimnya dorongan insentif atau penghargaan bagi OPD yang aktif berkontribusi data.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti. (Ardiansyah et al., 2023)

Baxter & Jack (2008) dalam pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan secara menyeluruh dan mendetail terhadap suatu objek yang sedang diteliti, seperti program, peristiwa, kegiatan, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman atau informasi yang lebih mendalam mengenai objek tersebut (Fadli,

2021). Fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan kasus, artinya hal yang actual (*real-life events*), sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat.

Wekke (2019) menjelaskan, “Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan.”. Selanjutnya menurut Danin “Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Ardiansyah et al. (2023) menjelaskan Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari penelitian kuantitatif. Beberapa karakteristik tersebut antara lain konteks yang alami yaitu penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami di mana fenomena yang diteliti terjadi, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan kompleks; pendekatan induktif yaitu penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif dalam analisis data, di mana temuan dan teori dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan hipotesis atau kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya; dan subjektivitas peneliti dimana peneliti kualitatif dianggap sebagai instrumen kunci dalam penelitian, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Subjektivitas peneliti diakui sebagai faktor yang mempengaruhi hasil penelitian.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan sangat penting dalam penelitian karena tanpa mengetahui atau melalui

teknik pengolahan data yang baik maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan (Wekke, 2019b). Dalam penelitian ini dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan.

3.3.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka atau *Library ReSearch* merupakan metode pengumpulan berbagai data melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data-data yang dikumpulkan tersebut sudah di dipelajari dan dipahami.

Menurut Zed dalam (Adlini et al., 2022):

“Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.”

3.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data langsung pada lokasi penelitian yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung. Pengumpulan Data dengan studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap individu dan lingkungan yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Pengamatan kualitatif bisa dilaksanakan dalam kondisi sebenarnya atau dalam lingkungan yang telah disusun secara spesifik untuk

tujuan penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Menurut Marshall (1995) dengan cara observasi, dapat diketahui perilaku dalam situasi sosial tertentu.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, Wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian pendahuluan atau untuk mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Percakapan tersebut berisi pertanyaan

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Afriansyah, 2016)

3.3 Informan

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi dan memahami mengenai masalah yang sedang diteliti dan bersedia untuk menjelaskan informasi yang dipahaminya kepada peneliti. Informan ini juga bisa disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini terdapat 3 kategori informan, yaitu Informan Kunci, Informan Utama, dan Informan Tambahan.

Informan tersebut ditetapkan dengan menggunakan teknik pemilihan Informan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling*, atau teknik pemilihan informan secara *purposive*, yang merupakan Teknik Pemilihan Informan untuk

memilih individu yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama (Asrulla et al., 2023). Dalam penelitian ini Informan Kuncinya adalah Staff Bidang Data dan Statistika Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

Informan utama dalam penelitian kualitatif dapat disamakan dengan tokoh sentral dalam sebuah narasi atau cerita. Dengan demikian, informan utama merupakan individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan teknis mengenai permasalahan penelitian yang akan diteliti (Wekke, 2019b). Dalam penelitian ini yang menjadi Informan Utamanya adalah PEDASI (Petugas Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Informan Tambahan, informan Tambahan ini informan yang memiliki dan memberikan informasi tambahan yang tidak dimiliki atau tidak disampaikan oleh Informan Kunci dan Informan Utama. Informan Tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau publik yang menggunakan Portal *Open Data* Bandung.

No.	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Muhammad Mulyawan	Pranata Komputer Ahli Pertama, Staff Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung	Informan Kunci
2.	Pangesti Rio Oktranida	Tenaga Ahli Data Administrator, Staff Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung	Informan Kunci
3.	Nurjandi	Pranata Komputer - PEDASI (Petugas	Informan

No.	Nama	Sebagai	Keterangan
	Abdillah	Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Kota Bandung	Utama
4.	Reni Lestari	Masyarakat Pengguna Portal <i>Open Data</i> Bandung	Informan Tambahan
5.	Giasani Syarifa Nasifah	PEDASI (Petugas Data dan Informasi) DP3A Kota Bandung - Perencana Ahli Pertama	Informan Utama

3.4 Operasional Parameter

Operasionalisasi parameter penelitian adalah proses merinci konsep-konsep agar mudah diukur (Sujatmoko & WR, 2024). Dalam riset ini peneliti menggunakan teori prinsip-prinsip dalam *Open Government* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengatakan bahwa prinsip *Open Government* atau pemerintahan yang terbuka itu terdiri dari tiga prinsip yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*accountability*), dan partisipasi (*participation*). Maka disusun operasionalisasi parameter sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Operasionalisasi Parameter *Open Government*

Konsep Kajian	Sub Fokus	Indikator	Sumber Data	Narasumber
<i>Open Government</i>	Transparansi (<i>Transparency</i>)	1. Kesiediaan dan Aksesibilitas Dokumen;	Data Primer dan Data Sekunder	1. Staff Bidang Data Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO);
		2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi		2. PEDASI (Petugas Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Kota Bandung;
		3. Mekanisme Keterbukaan.		3. PEDASI (Petugas Data dan Informasi) DP3A Kota Bandung; 4. Masyarakat atau publik

Konsep Kajian	Sub Fokus	Indikator	Sumber Data	Narasumber
	Tanggung Jawab (<i>accountability</i>)	1. Ketersediaan Informasi dan Laporan;	Data Primer dan Data Sekunder	1. Staff Bidang Data Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung;
		2. Mekanisme Pengaduan dan Umpan Balik;		2. PEDASI (Petugas Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Kota Bandung.
		3. Evaluasi;		3. PEDASI (Petugas Data dan Informasi) DP3A Kota Bandung;
		4. Budaya Akuntabilitas;		4. Masyarakat atau publik
	Partisipasi (<i>participation</i>)	1. Keterlibatan Masyarakat;	Data Primer dan Data Sekunder	1. Staff Bidang Data Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung;
		2. Keterlibatan OPD Lain;		2. PEDASI (Petugas Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Kota Bandung.
		3. Umpan Balik dan Responsivitas.		3. PEDASI (Petugas Data dan Informasi) DP3A Kota Bandung;
				4. Masyarakat atau publik

Sumber: OECD (2016)

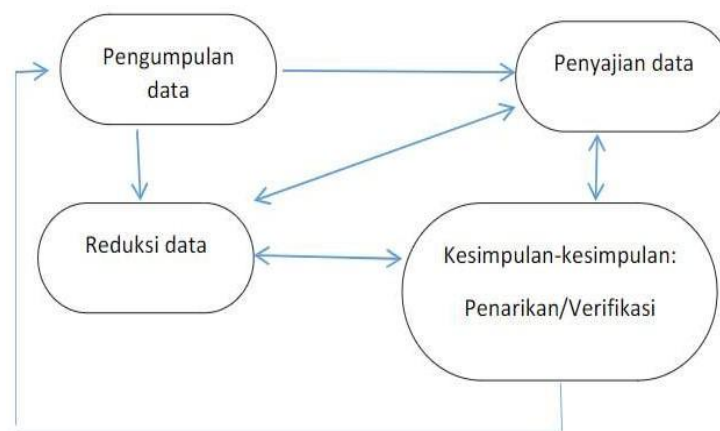
3.5 Analisis Data

Metode analisis data dalam sebuah penelitian dimulai dengan meninjau semua data yang ada dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi yang telah didokumentasikan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lain-lain. Informasi yang sudah dikumpulkan itu kemudian dianalisis dan

diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan pengurangan data dengan cara menyusun ringkasan yang mencakup pokok-pokoknya (abstraksi).

Wekke, 2019 menjelaskan “Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola.”

Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:



Sumber:(Rijali, 2019)

Gambar 3. 11 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses untuk memilih dan memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta pengubahan data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian dilakukan, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, seperti yang terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah yang diteliti, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data

meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses pengorganisasian sekumpulan informasi, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Presentasi data kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai format, seperti narasidalam bentuk catatan lapangan, tabel, diagram, jaringan, dan grafik. Pola-pola ini mengintegrasikan informasi yang disusun dalam sebuah format yang terstruktur dan mudah diakses, sehingga memungkinkan untuk memahami situasi yang sedang berlangsung, apakah kesimpulan yang diambil sudah benar atau perlu dilakukan analisis ulang.

3. Penarikan Simpulan

Peneliti melakukan proses menarik kesimpulan secara berkelanjutan selama mereka berada di lokasi penelitian. Sejak awal proses pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menggali makna dari berbagai objek, mendokumentasikan pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), memberikan penjelasan, serta mempertimbangkan berbagai konfigurasi yang mungkin, termasuk analisis hubungan sebab-akibat dan pernyataan-pernyataan hipotesis. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani dengan cara yang fleksibel, tetap mempertahankan keterbukaan, dan dengan sikap skeptis, meskipun kesimpulan tersebut sudah ada. Pada awalnya masih samar, tetapi seiring waktu, menjadi semakin jelas dan mendalam dengan kuat.

Analisis Data pada penelitian ini juga menggunakan *tools* atau alat bantu *software* yaitu aplikasi Atlas.Ti. Atlas.ti merupakan perangkat lunak yang

digunakan untuk analisis data kualitatif dari kumpulan data tekstual, grafis, audio, dan video yang lebih besar. Atlas.ti menjadi alat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendekatan sistematis untuk data tidak terstruktur, yaitu data yang tidak dapat dianalisis secara bermakna dengan pendekatan statistik formal.

Secara umum, perangkat lunak ini menjadi alat untuk mengelola, mengekstrak, membandingkan, mengeksplorasi, dan menyusun kembali potonganpotongan yang bermakna dari sejumlah data yang besar dengan cara kreatif, fleksibel, namun tetap sistematis.

Aplikasi Atlas.Ti ini membantu peneliti dalam penyajian data *coding*. *Software* ini termasuk jenis program CAQDAS (*Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software*) atau sama halnya dengan QDA *software* (*Qualitative Data Analysis Software*). (Afriansyah, 2016) Atlas.Ti ini memiliki *default relations*. Hubungan *default* yang ada pada perangkat lunak termuat dalam gambar tabel dibawah ini.

Relation Name	short name	symbolic name	width	color	Property
is-associated-with	R	==	1	Black	Symmetric
is-part-of	G	[]	1	Black	Transitive
is-cause-of	N	=>	1	Black	Transitive
contradicts	A	<>	1	Black	Symmetric
is-a	Isa	0	2	Black	Transitive
noname			1	Black	Symmetric
is-property-of	P	*]	1	Black	Asymmetric

Gambar 3. 12 Jenis Hubungan Pada Atlas.Ti

Sumber: Warsono et al. (2022)

Nama hubungan yang disebut *is-associated-with* ini disingkat menjadi "R" dan simbol yang digunakan untuk menyatakannya adalah "==". Hubungan *is-associated-with* dalam Atlas. Ti merupakan tipe hubungan yang digunakan untuk

menggambarkan hubungan antara dua atau lebih konsep tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang terdefinisi dengan jelas. Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa ide-ide tersebut sering kali muncul secara bersamaan dalam data, tetapi tidak serta-merta berarti bahwa satu ide menyebabkan yang lainnya.

Hubungan "*is-cause-of*" menunjukkan keterkaitan yang jelas antara sebab dan akibat, maka hubungan "*is-associated-with*" lebih cenderung bersifat deskriptif. Kaitan ini hanya menunjukkan bahwa dua gagasan sering terpampang berdampingan, tanpa menjelaskan alasan di baliknya.

Hubungan *is-part-of* adalah suatu jenis hubungan hierarkis yang berfungsi untuk mengindikasikan bahwa suatu kode merupakan komponen dari kode yang lebih luas. Dalam AtlasTi, istilah *Is-part-of* disingkat menjadi "G", dan simbol yang digunakan untuk mewakilinya adalah "[]".

Hubungan *is-cause-of* dalam Atlas. Ti merupakan jenis hubungan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara dua kode atau lebih. Keterkaitan ini memungkinkan kita untuk mengerti bagaimana sebuah fenomena atau gagasan dapat memicu atau mengakibatkan munculnya fenomena atau gagasan lainnya. Dalam AtlasTi, istilah *Is-cause-of* disingkat menjadi "N" dan simbol yang digunakan untuk mengindikasikaninya adalah "=>".

Hubungan yang bersifat kontradiktif dalam Atlas. ti merupakan jenis hubungan yang menggambarkan adanya konflik atau ketidakcocokan antara dua atau lebih kode atau kutipan. Keterkaitan ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi ketidaksesuaian, kontradiksi, atau variasi sudut pandang dalam data kualitatif. Dalam AtlasTi, istilah "*Contradicts*" disingkat menjadi "A" dan simbol yang

digunakan untuk merepresentasikannya adalah "<".

Hubungan *is-a* (adalah) digunakan untuk mengindikasikan adanya hubungan klasifikasi antara dua konsep. Artinya, sebuah konsep merupakan kategori khusus dari konsep yang lebih luas. Keterkaitan ini menghasilkan struktur konseptual yang memudahkan Anda dalam mengatur dan memahami informasi Anda secara lebih efektif. Dalam AtlasTi, istilah *Is-a* disingkat menjadi "Isa" dan simbol yang digunakan untuk merepresentasikannya adalah "()".

Dalam konteks perangkat lunak analisis data kualitatif ATLAS. ti, istilah "*noname*" mengacu pada sebuah kode atau elemen data yang belum menerima nama atau label yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kode sementara, kesalahan dalam pengkodean, serta penggunaan kode generik. Dampak dari "*noname*" terhadap Analisis Data adalah dapat mengurangi pemahaman, menyulitkan analisis lebih lanjut, dan berpengaruh pada keandalan.

Hubungan "*is-property-of*" (adalah bagian dari) dalam ATLAS. ti berfungsi untuk mengaitkan sebuah atribut atau ciri (properti) dengan suatu konsep atau entitas. Ini menunjukkan bahwa sebuah properti merupakan elemen yang terhubung atau menggambarkan suatu ide. Dalam AtlasTi, istilah *Is-property-of* disingkat menjadi "P" dan simbol yang digunakan untuk merepresentasikannya adalah "*}".

3.6 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data

dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

3.6.1 Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

3.6.2 Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3.6.3 Triangulasi Teori

Untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan menggabungkan teori-teori yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Triangulasi teori dilakukan dengan cara mencocokkan data temuan dengan teori terdahulu yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang yang sama. Dengan demikian, peneliti dapat memverifikasi dan memvalidasi hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah terbukti dan teruji.

3.7 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 6 Jadwal Penelitian

[illegible]